

ABSTRAK

Persoalan dalam pertambangan merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangka yang masuk dalam wilayah hukum Polres Bangka. Bahwa banyak ditemukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kondisi saat ini peraturan perundang-undangan tentang pertambangan serta faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis sosiologis* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa kondisi peraturan perundang-undangan tentang pertambangan saat ini adalah masih kurang efektif dan tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan regulasi turunannya tidak memperhatikan kondisi wilayah di Kabupaten Bangka khususnya, sehingga terkesan percuma dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka tersebut.

Faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan timah ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif adalah karena: a) hukum itu sendiri yang tidak relevan; (b) aparat pengak hukumnya yang secara kuantitas dan kualitas masih kurang; (c) sarana dan fasilitas pendukung yang tidak disediakan oleh pemerintah; (d) masyarakat setempat yang telah akrab dan terbiasa melakukan penambangan ilegal; dan (e) kebudayaan gotong royong yang negatif.

Upaya yang dilakukan Polres Bangka adalah : (a) penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sektor hulu, namun jg sektor hilir demi mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan; (b) memberdayakan penyidik polsek dalam menangani pertambangan ilegal dan mengadakan *coaching clinic*; (c) pengadaan sarana dan fasilitas melalui satuan atas; (d) bekerja sama dengan pemda guna membuka lapangan kerja baru, seperti petani lada; dan (e) mengedepankan tindakan preemtif dan preventif tentang bahaya dan dampak pertambangan ilegal.

Saran dari penelitian ini adalah penandatanganan pakta integritas penyidik guna menjamin konsistensi dalam penanganan tindak pidana pertambangan ilegal.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Pertambangan Ilegal*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL MINING STATEMENTS IN THE POLRES BANGKA LEGAL TERRITORY

The problem with mining is the impact of policy uncertainty, illegal mining, conflicts with local communities, mining sector conflicts with other sectors. Similarly, what happens in the jurisdiction of Polrers Bangka and several other locations in Indonesia, that many who do mining without permission, resulting in harm to both the public and the State.

The problem studied in this research is the current condition of mining laws and the factors that cause law enforcement of illegal mining crime in Bangka regency police territory is not effective. The method used in this research is with the sociological juridical approach derived from data collection obtained from the primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method.

The result of this research will give the answer on the condition of the current law about mining is not yet effective and not relevant to the real condition. The Act no. 4 of 2009 about mineral and coal mining and its regulation does not take any attention on the condition of the Bangka regency region, this implies the effort on eradicating illegal mining in the Bangka regency is in vain.

The factors which result on the ineffectively of law enforcement in illegal mining in the jurisdiction of the Bangka Police Resort are: (a) irrelevant laws; (b) law enforcer is still lacking in quantity and quality; (c) inadequate facilities and infrastructure provided by the local government; (d) illegal mining has become a habit to the local populace; and (e) non-existent mutual cooperation culture.

Efforts made by the Bangka Police Resort includes: (a) law enforcements that not only focuses on the source, but also the outcome to create an environmentally friendly mining; (b) empowering Sectorial Police investigator in handling illegal mining and holding coaching clinics; (c) procurement of facilities and infrastructures by the upper units; (d) cooperating with the local government to create new jobs such as pepper farmers; and (e) promoting preemptive and preventive actions on the danger and negative impact of illegal mining.

Suggestion from this research is to sign an integrity pact for investigators to guarantee the consistency in the enforcement of illegal mining.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts and Illegal Mining.*